

ABSTRAK

Nama : Achmad Fauzan
Program Studi : Magister Hukum
Judul : *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia
dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam prakteknya rawan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Good Governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam pengelolaan administrasi publik. Selain itu, negara berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia terhadap semua warganya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Penelitian ini melihat hubungan antara *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat berpeluang menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena aturan pelaksanaannya kurang ketat untuk menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu asas transparansi dan akuntabilitas. Meskipun secara persyaratan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan persyaratan yang bersifat diskriminatif. Pada prakteknya, peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat timbul dari proses pemeriksaan lembar jawaban komputer, yaitu adanya manipulasi. Jika hal ini terjadi akan mengakibatkan masyarakat kelas bawah atau yang tidak punya akses terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi terdiskriminasi. Hal ini akan mengurangi Hak Asasi Manusia sebagai warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil akan selalu berhubungan dengan *Good Governance*. Jika *Good Governance* diterapkan dalam setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tidak akan ada Warga Negara yang Hak Asasi Manusianya dilanggar. Tetapi, jika tidak menerapkan *Good Governance*, maka akan melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci:

good governance, transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia, diskriminasi

ABSTRACT

Name : Achmad Fauzan
Study Program : Master of Law
Title : Good Governance and Human Rights in the
Procurement of Civil Servants

Every citizen of the Republic of Indonesia have the same opportunity to apply as a Civil Servant. Procurement of Civil Servants in practice sensitive to corruption, collusion and nepotism. Good Governance is seen as a new paradigm and a feature that should exist in the management of public administration. In addition, the state is obliged to protect the human rights of all citizens to get equal opportunities.

This study observes the relationship between Good Governance and Human Rights in the procurement of Civil Servants.

This study uses Normative Legal Research.

Results showed that in the procurement process of Civil Servant can potentially lead to corruption, collusion and nepotism, because its implementation is less stringent rules to implement the principles of good governance principles of transparency and accountability. Although the procurement requirements of Civil Servants can not find the requirements are discriminatory. In practice, the chance of Corruption, Collusion and Nepotism may arise from the process of checking a computer answer sheet, namely the manipulation. If this happens will result in lower classes of society or who have no access to the procurement of Civil Servants has become discriminated. This will reduce the Human Rights as a citizen to obtain equal opportunities in obtaining employment.

Procurement of Civil Servants will always be associated with good governance. If good governance is applied in every procurement of Civil Servants, there will not be a citizen of Human Rights are violated. But, if it does not apply Good Governance, it will violate the Human Rights to get the same opportunity to be Civil Servants.

Key Words :

good governance, transparency, accountability, human rights, discrimination